

Katalog BPS : 4601003.52

Statistik Politik

Provinsi Nusa Tenggara Barat

2017



Badan Pusat Statistik

Provinsi Nusa Tenggara Barat



Statistik Politik

Provinsi Nusa Tenggara Barat

2017

<https://nwb.bps.go.id>

Statistik Politik

Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017

ISBN :
No. Publikasi : 52520.1810
Katalog BPS : 4601003.52

Naskah:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Desain Tata Letak:

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2018
xii+ 48 halaman; 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tim Penyusun

Pengarah :

Suntono, SE, M.Si

Koordinator Teknis :

Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si

Naskah :

Isna Zuriatina, S.ST, MT

Pengolah Data :

Isna Zuriatina, S.ST, MT

Gambar Kulit :

Isna Zuriatina, S.ST, MT

Penyunting :

Amy Wardian Pratama, S.ST
Hertina Yusnissa, S.ST, MM
M. Ikhsany Rusyda, S.ST, M.Si
Yati Daryati Nurmalasari, S.ST

Kata Pengantar

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS Provinsi NTB) berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas BPS untuk penyediaan dan publisitas data beragam dan berkualitas merupakan hal yang tak terelakkan lagi dimasa mendatang, sehingga BPS berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan data terkait gambaran umum politik di NTB. Data-data yang disajikan bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017, serta bersumber dari beberapa instansi seperti Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Bakesbangpoldagri, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan data-data tahun 2017 seperti tingkat partisipasi politik, produk perundangan, demokrasi, dan sebagainya. Data-data pemilu legislatif tahun 2014 tetap ditampilkan dikarenakan belum adanya data pemilu legislatif dan pemilukada terbaru. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan data, publikasi statistik Politik akan terus mengalami penyempurnaan, baik struktur maupun muatan.

Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan agar penyusunan berikutnya lebih sempurna.

Mataram, September 2018
BADAN PUSAT STATISISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
K e p a l a,

SUNTONO

Abstraksi

Pesta demokrasi merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat karena pilkada dan pemilu legislatif merupakan salah satu ajang yang ditunggu oleh masyarakat untuk memilih sendiri pemimpinnya. Situasi politik di NTB dapat digambarkan diantaranya dengan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilukada yang terakhir dilaksanakan. Untuk pemilu legislatif di tingkat provinsi, hasil perolehan suara terbanyak diraih Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi. Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3.499.265 jiwa, 70,05 persen diantaranya menggunakan hak pilih dan 29,95 persen golput. Dari jumlah perolehan suara tersebut 95,53 persen suara dinyatakan sah dan 4,47 persen suara tidak sah.

Jumlah peraturan daerah (perda) yang dihasilkan DPRD Provinsi pada tahun 2017 sebanyak 13, meningkat jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yaitu 12 perda. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas perda tersebut. Dari 13 jumlah perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTB selama tahun 2017, 4 diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD.

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Jumlah ormas dan LSM yang mendaftar di Bakesbangpoldagri

Provinsi NTB pada tahun 2017 sebanyak 17, dan total yang terdaftar sampai tahun 2017 sebanyak 294.

Demokrasi merupakan bagian dari sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2017, IDI NTB sebesar 76,04 naik 10,63 poin dibandingkan dengan IDI NTB 2016 yang sebesar 65,41. Dengan pencapaian nilai IDI tersebut, tingkat kinerja demokrasi di NTB tetap bertahan pada kategori sedang. Dari data IDI 2017 diperoleh informasi variabel-variabel yang perlu mendapat perhatian lebih, diantaranya variabel kebebasan berkeyakinan, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, dan variabel peran DPRD.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Abstraksi.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
BAB I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II. Metodologi.....	5
2.1 Jenis dan Sumber Data	5
2.2 Konsep dan Definisi	5
BAB III. Gambaran Umum Provinsi NTB.....	9
BAB IV. Gambaran Umum Politik NTB.....	11
4.1 Pemilu Legislatif Terakhir	11
4.2 Peran DPRD	12
4.3 Pemilihan Kepala Daerah Terakhir	14
4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM	18
4.5 Perkembangan Demokrasi di NTB	20
TABEL-TABEL.....	27

Daftar Gambar

Gambar 4.1	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2017.....	13
Gambar 4.2	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2016-2017	14
Gambar 4.3	Persentase Pemilih dalam Pemilu pada Terakhir menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/kota di NTB.....	17
Gambar 4.4	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2017.....	19
Gambar 4.5	Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2009 - 2017...	22
Gambar 4.6	Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil NTB, 2009 - 2017	24
Gambar 4.7	Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik NTB, 2009 - 2017.....	25
Gambar 4.8	Perkembangan Aspek Lembaga Demokrasi NTB, 2009 - 2017	25

Daftar Tabel

Tabel 1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di NTB Tahun 2017.....	29
Tabel 2.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.....	30
Tabel 3.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017.....	31
Tabel 4.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017.....	32
Tabel 5.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017.....	33
Tabel 6.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017.....	34
Tabel 7.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dompu Tahun 2017	35
Tabel 8.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2017.....	36
Tabel 9.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017.....	37
Tabel 10.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017.....	38
Tabel 11.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2017.....	39

Tabel 12.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2017	40
Tabel 13.	Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat.....	41
Tabel 14.	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat.....	42
Tabel 15.	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat.....	43
Tabel 16.	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat.....	44
Tabel 17.	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat.....	45
Tabel 18.	Jumlah Peraturan Daerah dan Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD di NTB Tahun 2017.....	46
Tabel 19.	Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Mendaftar dan Total Terdaftar di NTB Tahun 2017	47
Tabel 20.	Perkembangan Indeks Variabel IDI Nusa Tenggara Barat, 2016-2017	48

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kondisi politik yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas situasi politik akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Berbagai perubahan sistem politik yang terjadi di Indonesia menciptakan perbedaan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Ketika reformasi 1998 bergulir dan mengakhiri masa orde baru, situasi politik nasional pun mengalami tuntutan serupa untuk berubah dan berbenah. Kekuasaan penyelenggaraan negara yang sebelumnya berjalan tersentral di pusat pada masa orde baru, perlahan mengalami perubahan untuk mengakomodir tuntutan reformasi. Tuntutan pendistribusian kekuasaan tersebut terjadi dalam 2 level, horizontal dan vertikal. Di level horizontal, lembaga-lembaga negara diluar eksekutif diperkuat agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Di level vertikal, adanya pemberlakuan otonomi daerah yang mendelegasikan berbagai kewenangan yang sebelumnya merupakan otoritas pusat sehingga bisa dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Perubahan-perubahan situasi politik tersebut juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Berbagai kepentingan dalam masyarakat

diberikan ruang untuk menyalurkan aspirasinya, diantaranya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik di daerah. Secara umum, partai-partai politik yang bermunculan di daerah merupakan kepanjangan dari parpol di pusat.

Selain itu, perubahan budaya politik yang semakin terbuka juga menjadi aspek yang penting. Media cetak ataupun elektronik menjadi leluasa memberikan kritik terhadap pemerintah. Organisasi-organisasi masyarakat baru bermunculan sebagai wadah masyarakat menyampaikan kepentingannya. Kebebasan menyalurkan pendapat dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan.

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik.

Diantara isu penting yang muncul adalah tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Pada pemilu 2014 ketentuan kuota minimal 30 % perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dengan sistem zipper (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berimbang, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan

rakyat. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Publikasi Statistik Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017 ini disusun untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik di NTB. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi politik masyarakat NTB. Tujuan khususnya adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik hasil pemilukada terakhir di Kabupaten/kota dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pembangunan politik dan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan demokrasi di NTB.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik Provinsi NTB 2017 menyajikan gambaran politik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di wilayah NTB.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam tiga bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menjelaskan gambaran umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bab terakhir adalah menyajikan gambaran umum politik (Bab IV).

BAB II

Metodologi

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan data sekunder dinas/instansi dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Data BPS berasal dari hasil proyeksi penduduk, dan Indeks Demokrasi Indonesia sedangkan data dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Polres/Polresta/Polda, KPU, Bakesbangpoldagri, dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikumpulkan melalui Survei Politik dan Keamanan.

2.2 Konsep dan Definisi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004).

Golongan Putih

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih

yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Pemilih

Pemilih adalah warga Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah kawin (Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2008)

Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu

Partisipasi Penduduk Dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi 2, konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta non konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

BAB III

Gambaran Umum Provinsi NTB

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada 115^o46' – 119^o5' Bujur Timur dan 8^o10' – 9^o5' Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi dan berada di kawasan Timur Indonesia, yang terletak diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gora (Gogo-Rancah) artinya bumi yang dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun di daerah basah.

Letak NTB yang berbatasan langsung dengan daerah tujuan wisata dunia yaitu Provinsi Bali, sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang sangat bagus pemandangan alam dan pantainya. Seperti: Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Lakey dan obyek wisata lainnya.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.154,84 km², terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali luas Pulau Lombok. Sebanyak 280 pulau terdapat di Provinsi NTB dan baru 32 pulau yang berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan 117

kecamatan dan 1.143 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa mempunyai jumlah kecamatan yang paling banyak, yaitu 24 kecamatan dan kabupaten yang paling banyak mempunyai jumlah desa/kelurahan, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa/kelurahan.

Persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata baik antar pulau maupun kabupaten/kota. Penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.183.204 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 140.890 jiwa. Dengan luas wilayah yang lebih sempit, Pulau Lombok dihuni oleh 3,47 juta jiwa atau sekitar 70,11 persen dari jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat dan pulau Sumbawa yang lebih luas hanya dihuni oleh sekitar 1,48 juta jiwa atau 29,89 .persen dari jumlah penduduk NTB.

BAB IV

Gambaran Umum Politik NTB

4.1 Pemilu Legislatif Terakhir

Dinamika politik di Indonesia juga dirasakan di NTB. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang mendapat kursi di DPRD baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat NTB. Di tingkat provinsi, hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014 sesuai urutan dari terbanyak adalah sebagai berikut: Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Bintang Restorasi.

Tabel 3-12 menyajikan data tentang jumlah anggota DPRD menurut partai politik dan kabupaten/kota di NTB tahun 2016. Dalam tabel-tabel tersebut tampak bahwa jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten/kota berkisar antara 10 sampai dengan 12 partai. Kabupaten/kota di Pulau Lombok dikuasai oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Partai Golkar memenangi pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram,

sedangkan Partai Demokrat memenangi pemilu legislatif di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Di Pulau Sumbawa, semua pemilu legislatif dimenangi oleh PAN kecuali di Kabupaten Sumbawa.

Dua kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di NTB adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan masing-masing anggota sebanyak 50 orang. Dari keterwakilan perempuan di legislatif, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu-satunya kabupaten yang semua kursinya diisi oleh laki-laki.

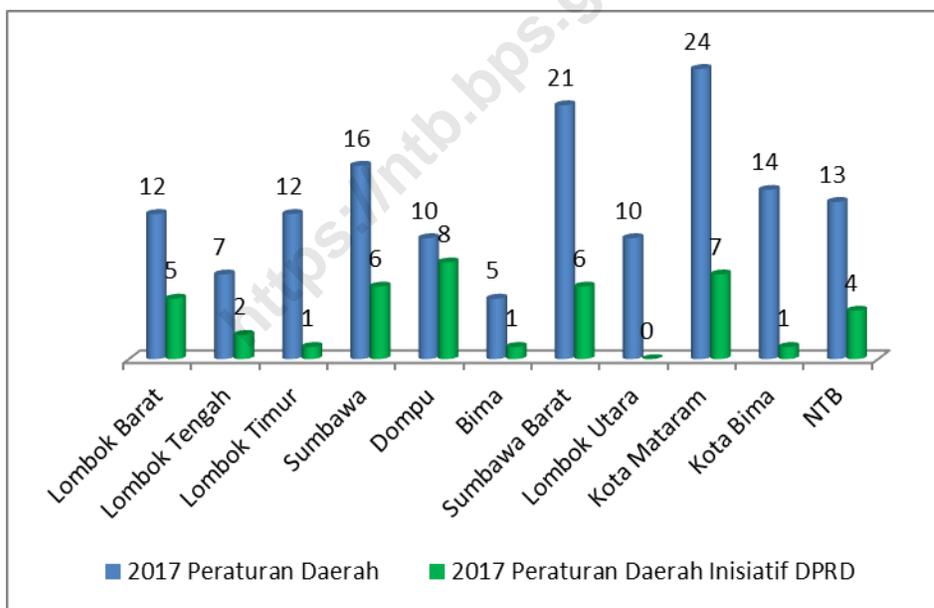
4.2 Peran DPRD

DPRD memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran daerah, dan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Salah satu peran DPRD adalah menyusun peraturan daerah (perda) baik berdasarkan usulan pihak eksekutif maupun yang diinisiasikan oleh DPRD. Pada tahun 2017 DPRD Provinsi NTB menghasilkan perda sebanyak 13 buah. Dari jumlah tersebut, 4 diantaranya merupakan inisiasi dari DPRD (inisiatif DPRD).

Selama tahun 2017, peraturan daerah paling banyak dihasilkan oleh DPRD Kota Mataram, yaitu sebanyak 24 perda. Sedangkan yang paling sedikit menghasilkan peraturan daerah adalah DPRD Kabupaten Bima dengan 5 perda. Jumlah perda yang banyak yang dihasilkan oleh

suatu daerah tidak dapat menjadi ukuran telah dijalankannya fungsi legislasi DPRD dengan baik, akan tetapi harus dilihat juga kualitas dari perda yang dihasilkan tersebut. Apabila dilihat dari jumlah perda yang merupakan inisiatif DPRD, DPRD di semua kabupaten/kota yang ada di NTB dipandang belum memuaskan publik. Hal ini dikarenakan rendahnya inisiatif pembuatan perda yang disahkan, bahkan di Kabupaten Lombok Utara, dari 10 perda yang dihasilkan tidak ada yang merupakan inisiatif dari DPRD.

Gambar 4.1
Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD
Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2017

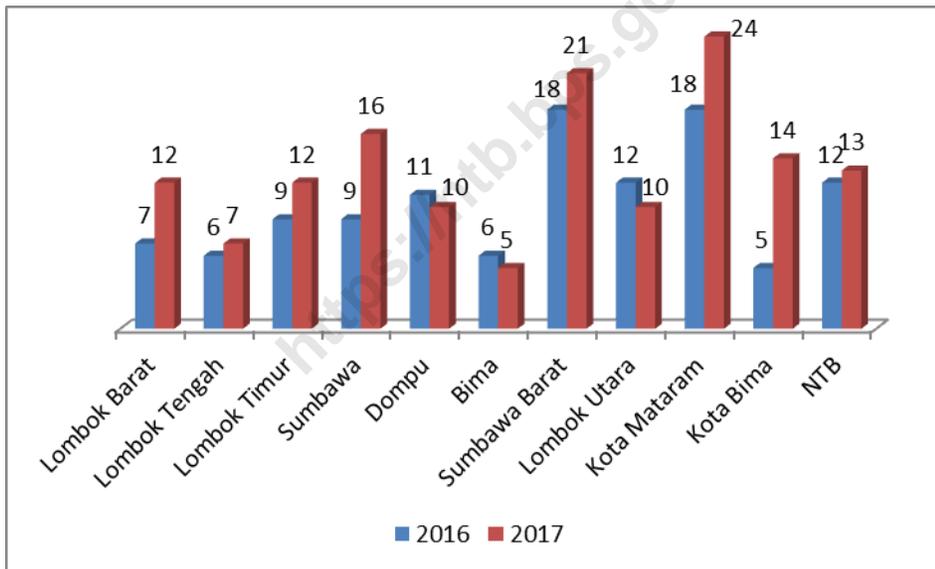


Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Sepanjang tahun 2016-2017, jumlah perda yang dihasilkan di kabupaten/kota yang ada di NTB cenderung meningkat. Walaupun ada tiga kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah perda yang

dihasilkan selama 2016-2017, yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Lombok Utara. Peningkatan paling tinggi jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD selama tahun 2016-2017 terjadi di Kota Bima. Jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Bima meningkat dari 5 perda pada tahun 2016 menjadi 14 perda pada tahun 2017. Peningkatan jumlah perda yang dihasilkan diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas terhadap perda yang dihasilkan tersebut.

Gambar 4.2
Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD
Provinsi dan Kabupaten/kota di NTB Tahun 2016-2017



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

4.3 Pemilihan Kepala Daerah Terakhir

Dinamika aturan bernegara menyebabkan istilah-istilah politik terkait penyelenggaraan pemilu di daerah juga mengalami perubahan. Berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004, Pilkada di bawah era

Otonomi Daerah terkait penyelesaian sengketa ada di Mahkamah Agung (MA). Kemudian muncul UU yang baru nomor 22 tahun 2007, yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari Pemilu sehingga disebut Pemilukada. Penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU secara nasional dan penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tahun 2011 terbit undang-undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang itu tidak lagi disebut Pemilukada tetapi disebut dengan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan walikota. Hal itu sesuai dengan UUD yang menyebutkan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Sehingga bukan disebut kepala daerah tetapi disebut langsung jabatannya yaitu gubernur, walikota atau bupati.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara utuh tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No.17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut.

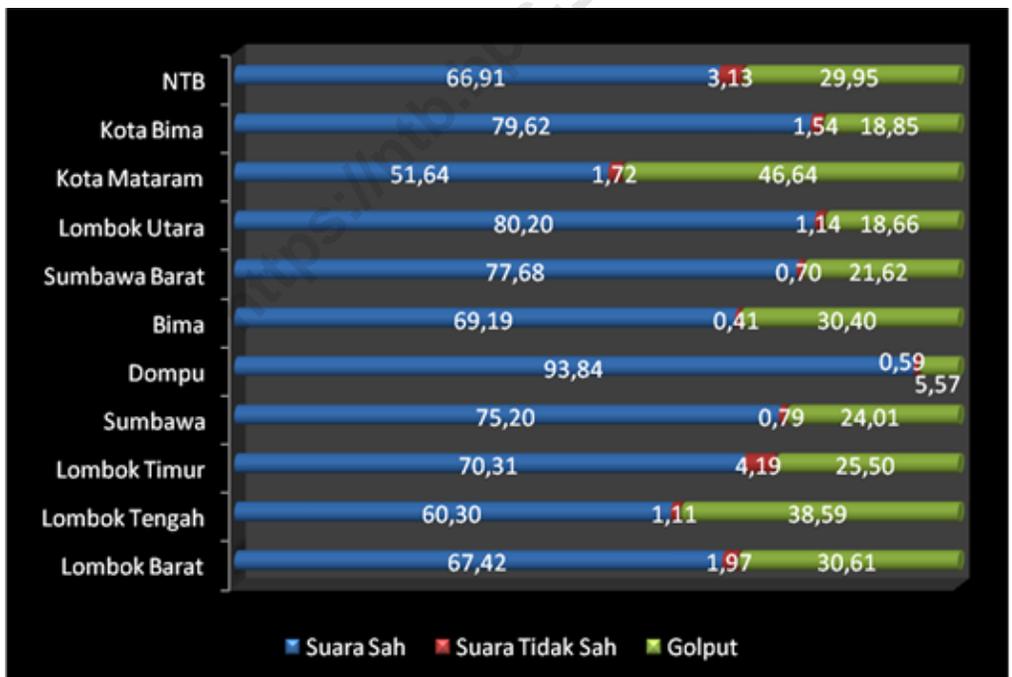
Mengenai mekanisme pencalonan ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

1. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon
2. Parpol atau gabungan parpol sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
3. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Tabel 13 sampai dengan tabel 17 menyajikan data tentang pelaksanaan pilkada, jumlah pemilih, jumlah pasangan calon, dan karakteristik pasangan terpilih pada pilkada tingkat kabupaten/kota terakhir di NTB. Pelaksanaan pilkada tingkat kabupaten/kota di

Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima dilaksanakan secara bersama-sama pada tanggal 13 Mei 2013 (bersamaan dengan Pemilihan Gubernur terakhir). Di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram pilkada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, sedangkan di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 23 September 2013 dan Kabupaten Bima tanggal 15 Desember 2015.

Gambar 4.3
Persentase Pemilih dalam Pemilu Terakhir Menurut Hasil Perolehan Suara dan Kabupaten/Kota di NTB



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Persentase suara yang sah dan persentase perolehan suara pasangan yang sah untuk masing-masing kabupaten/kota cukup

bervariasi, demikian juga persentase perolehan suara bagi pasangan terpilih. Persentase suara yang sah terhadap jumlah DPT terbesar, lebih dari 93 persen ada di Kabupaten Dompu dalam pemilukada di tahun 2015. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan politik di Kabupaten Dompu sudah cukup baik. Kota Mataram merupakan wilayah dengan persentase suara sah terhadap DPT terendah dibanding kabupaten/kota lain se-NTB dengan besaran 51 persen.

Pemilukada yang diselenggarakan di Kota Bima diikuti oleh 7 pasangan calon (paslon), terbanyak diantara pemilukada di kabupaten/kota lainnya. Banyaknya jumlah paslon tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persentase perolehan suara paslon pemenang di pemilukada Kota Bima adalah yang terendah dibanding paslon pemenang di pemilukada kabupaten/kota yang lain.

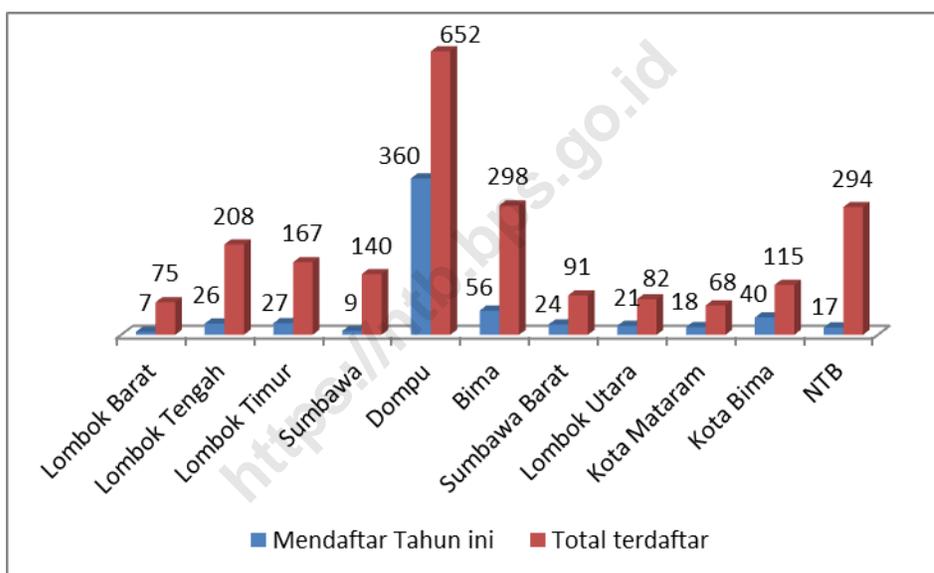
Satu-satunya pemilukada yang menghasilkan pemenang dari calon independen (tidak dicalonkan oleh partai politik) adalah pemilukada di Kabupaten Lombok Timur. Semua kepala daerah yang terpilih di pemilukada di wilayah NTB adalah laki-laki kecuali di Kabupaten Bima. Selain sebagai satu-satunya kepala daerah perempuan di wilayah NTB, usia saat terpilihnya juga yang termuda diantara kepala daerah yang lain.

4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Ormas dan LSM ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama pada ranah politik. Perkembangan jumlah ormas

dan LSM di NTB meningkat, saat ini ada setidaknya 2000 ormas atau LSM yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Jumlah ormas dan LSM yang mendaftar di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB pada tahun 2017 sebanyak 17, dan total yang terdaftar sampai tahun 2017 sebanyak 294.

Gambar 4.4
Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) atau LSM Menurut Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2017



Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Berdasarkan Gambar 12, perkembangan jumlah ormas atau LSM yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak hanya pada tingkat provinsi saja melainkan juga pada tingkat kabupaten/kota. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan jumlah ormas atau LSM ini antara lain karena perkembangan di bidang politik, demokrasi, perkembangan ekonomi dan teknologi. Kabupaten Dompu merupakan kabupaten yang memiliki ormas atau LSM terbanyak jika dibandingkan

dengan kabupaten lainnya, yaitu sebanyak 652, dimana 360 ormas atau LSM mendaftar pada tahun 2017 di Bakesbangpoldagri. Ormas atau LSM akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

4.5 Perkembangan Demokrasi di NTB

Menurut konsep demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka yang mewakili rakyat yang dipilih di bawah sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Namun secara praktek di lapangan demokrasi diterapkan secara berbeda-beda. Penerapan demokrasi beragam, sering kali diterapkan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah dan terdapat keterbandingan antar wilayah diperlukan instrumen yang universal.

Freedom House melakukan pengukuran demokrasi pada tahun 1972 menggunakan klasifikasi *free countries*, *partly free countries*, dan *non free countries*. Sejak tahun 2008, Negara Indonesia termasuk dalam *free countries*, sementara sebelumnya digolongkan dalam negara *partly free countries*. Untuk mengukur pembangunan demokrasi sampai level provinsi, sejak tahun 2007, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat

memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan

pada tahun berikutnya misalnya IDI Tahun 2009 diukur tahun 2010, IDI tahun 2010 diukur pada tahun 2011 dan seterusnya. Metode pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap seperti koding koran, koding dokumen, FGD dan wawancara mendalam.

5

Potret demokrasi di NTB dapat dilihat dari nilai IDI NTB. Sejak tahun 2009 IDI NTB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini sangat tergantung pada peran serta pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi. Tahun 2017 IDI NTB memiliki nilai 76,04, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 65,41. Nilai ini dapat dikategorikan sedang karena nilai IDI berkisar 0 – 100. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni ‘rendah’ (indeks < 60), ‘sedang’ (indeks 60 – 80), dan ‘tinggi’ (indeks >80). Peningkatan ini tentu saja menggambarkan bahwa kinerja demokrasi di NTB semakin baik.

Gambar 4.5
Perkembangan Indeks Demokrasi NTB, 2009 – 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kinerja demokrasi yang semakin membaik bukanlah hanya berasal dari kinerja pemerintah semata, tetapi juga peran serta masyarakat dalam berdemokrasi. IDI diukur dari tiga aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Aspek kebebasan sipil menyoroti hal-hal yang terkait adanya kejadian/tindakan dari aparat pemerintah atau masyarakat yang membatasi kebebasan masyarakat untuk berkumpul/berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, atau kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik mencakup hak memilih dan dipilih serta hak partisipasi politik. Aspek ini menyoroti kejadian dimana hak memilih dan dipilih masyarakat dihambat, pengaduan/keluhan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, serta demonstrasi yang bersifat anarkis. Aspek lembaga demokrasi menyoroti peran dari lembaga-lembaga demokrasi seperti peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peran peradilan yang independen.

Apabila dilihat lebih mendalam, peningkatan nilai IDI selama kurun waktu 2016-2017 disebabkan oleh meningkatnya nilai variabel kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, peran DPRD, peran birokrasi pemerintah, dan peran peradilan yang independen. Akan tetapi, di sisi lain terdapat beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah antara lain meminimalisir demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dan perlu ditingkatkannya peran legislasi dan pengawasan DPRD dalam meningkatkan jumlah perda inisiatif dan rekomendasi kepada eksekutif.

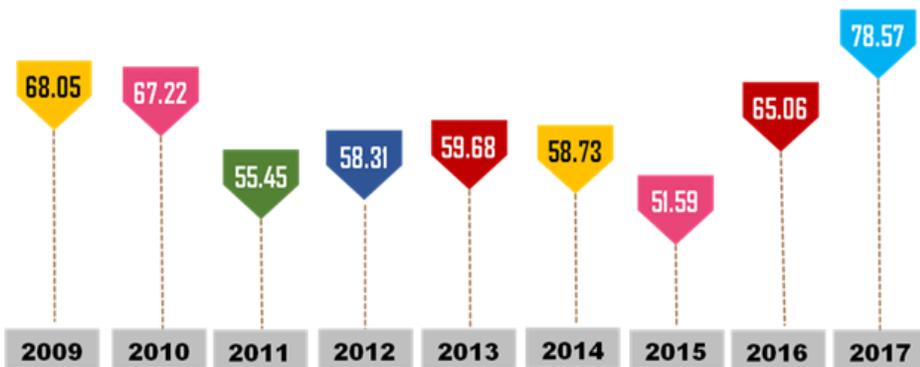
Angka IDI 2017 tersebut merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan nilai 79,40; aspek hak-hak politik sebesar 62,08; dan aspek lembaga

demokrasi sebesar 93,98. Secara lebih rinci, pada 2017 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi yang mengalami kenaikan berturut-turut 14,34 dan 22,85 poin.

Perkembangan aspek IDI selama kurun waktu 2009-2017 mengalami fluktuasi. Aspek kebebasan sipil berfluktuasi dan cenderung meningkat. Aspek hak-hak politik merupakan aspek dengan nilai paling rendah dan mulai mengalami peningkatan. Aspek lembaga demokrasi juga berfluktuasi dan mengalami peningkatan.

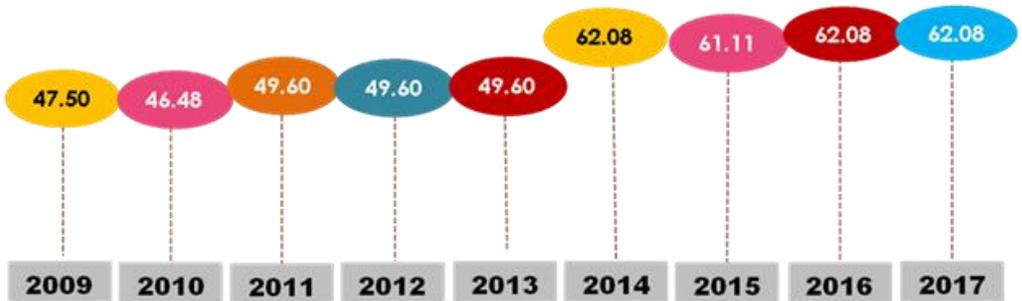
Berbeda dengan tahun 2015, sejak tahun 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Tahun 2017, untuk indeks aspek Kebebasan Sipil tetap berada di kategori “sedang”. Indeks aspek Hak-Hak Politik juga tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Lembaga Demokrasi yang di tahun sebelumnya berada pada kategori “sedang”, di tahun 2017 ini meningkat menjadi kategori “baik”.

Grafik 4.6
Perkembangan Aspek Kebebasan Sipil NTB, 2009-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4.7
Perkembangan Aspek Hak-Hak Politik NTB, 2009-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

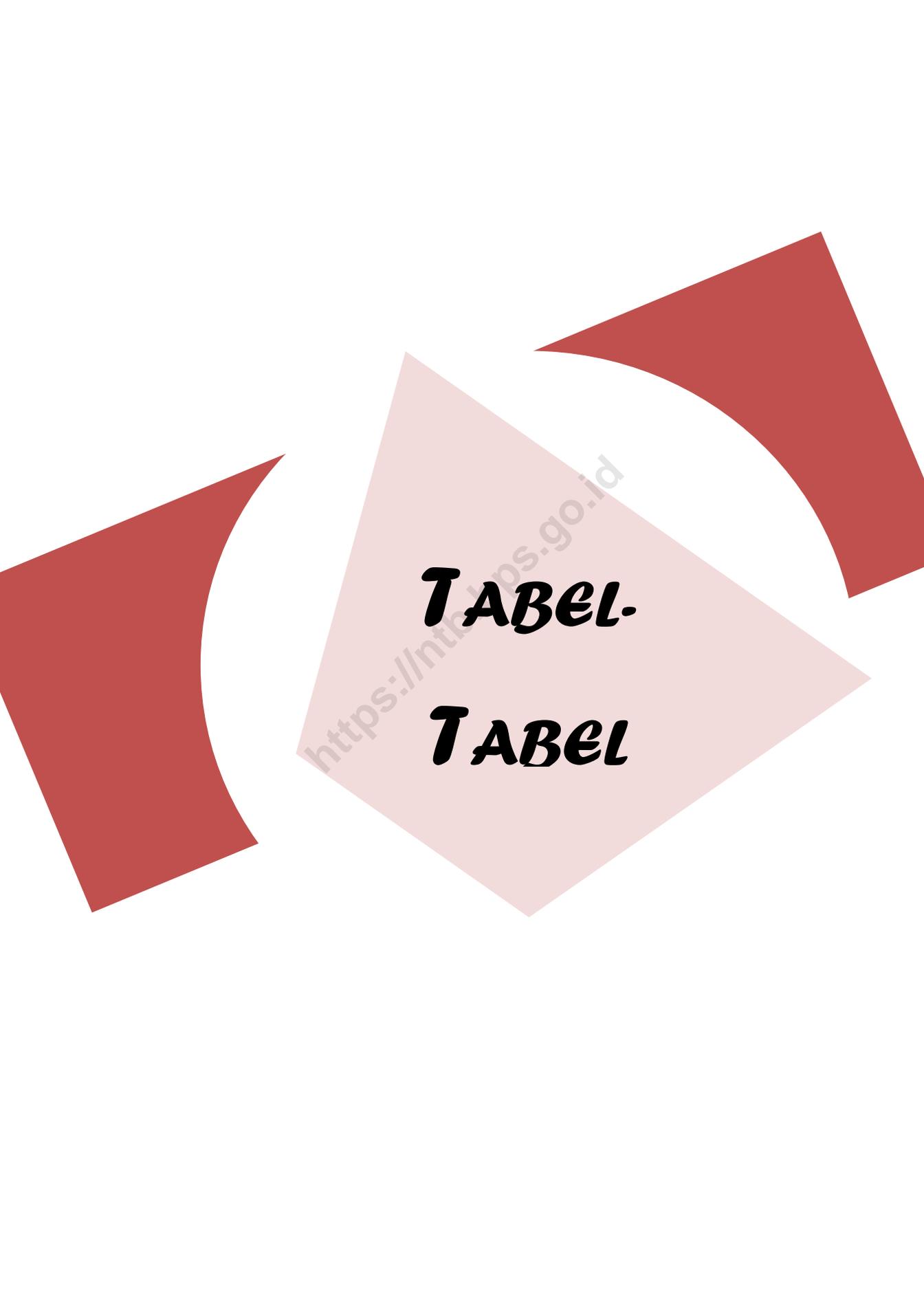
Grafik 4.8
Perkembangan Aspek Lembaga Demokrasi NTB, 2009-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam IDI, khusus untuk variabel hak memilih dan dipilih dilakukan pengukuran setiap 5 tahun sekali karena terdiri dari indikator jumlah kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat,

jumlah kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*), jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, dan jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Indikator-indikator tersebut akan menentukan perkembangan nilai IDI sehingga dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi yang akan diselenggarakan.



TABEL.

TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	1.053,87	10	122	675.222
Lombok Tengah	1.208,39	12	139	930.797
Lombok Timur	1.605,55	21	254	1.183.204
Sumbawa	6.643,98	24	166	449.680
D o m p u	2.321,55	8	81	245.387
B i m a	4.389,40	18	192	478.967
Sumbawa Barat	1.849,02	8	65	140.890
Lombok Utara	809,53	5	33	216.515
Kota Mataram	61,30	6	50	468.509
Kota Bima	222,25	5	41	166.407
Nusa Tenggara Barat	20.154,84	117	1.143	4.955.578

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2020

Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	10	1	11
Partai Demokrat	7	1	8
Partai Gerindra	8	-	8
Partai Keadilan Sosial (PKS)	6	-	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	1	6
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	1	4
PDI Perjuangan (PDIP)	5	-	5
Paratai Amanat Nasional (PAN)	5	-	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	1	5
Bintang Restorasi	5	1	6
Jumlah	58	6	64

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 3. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	5	0	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	0	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	1	3
PDI Perjuangan (PDIP)	4	0	4
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	1	6
Partai Gerindra	3	2	5
Partai Demokrat	3	0	3
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	0	4
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	2	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	2
Jumlah	37	7	44

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	8	1	9
Partai Demokrat	5	0	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	1	6
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
PDI Perjuangan (PDIP)	2	0	2
Partai Gerindra	5	1	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	1	5
Partai Bulan Bintang (PBB)	4	0	4
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	0	4
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Jumlah	46	4	50

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 5. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrat	7	0	7
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	0	5
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4	1	5
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0	5
Partai Gerindra	5	0	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
PDI Perjuangan (PDIP)	2	2	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	3	0	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	0	3
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Jumlah	47	3	50

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 6. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI Perjuangan (PDIP)	6	0	6
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6	0	6
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	0	5
Partai Pembangunan Persatuan (PPP)	5	0	5
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	1	5
Partai Gerindra	5	0	5
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4	0	4
Partai Demokrat	4	0	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
PBB /PKPI	2	0	2
Jumlah	44	1	45

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 7. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dompu Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	-	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	-	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	1	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	-	3
PDI Perjuangan (PDIP)	2	1	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3	-	3
Partai Gerindra	3	-	3
Partai Demokrat	2	-	2
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	-	2
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	-	1
Jumlah	27	3	30

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 8. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bima Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	6	1	7
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6	-	6
Partai Demokrat	4	1	5
Partai Gerindra	4	-	4
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	4	-	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	-	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	2	4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	-	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	-	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	1	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	2
Jumlah	39	6	45

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 9. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	-	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	3	-	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1	-	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	-	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	-	1
PDI Perjuangan (PDIP)	3	-	3
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2	-	2
Partai Gerindra	3	-	3
Partai Demokrat	2	-	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-	1
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	-	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	-	2
Jumlah	25	-	25

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 10. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrat	3	2	5
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	0	4
Partai Gerindra	3	0	3
PDI Perjuangan (PDIP)	3	0	3
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3	0	3
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	0	3
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	0	2
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	0	1
Jumlah	28	2	30

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 11. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Mataram Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	7	2	9
Partai Gerindra	5	1	6
PDI Perjuangan (PDIP)	5	0	5
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	0	5
Partai Demokrat	3	1	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	0	3
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	0	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	0	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	0	2
Partai Amanat Nasional (PAN)	1	0	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	1	1
Jumlah	35	5	40

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 12. Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Bima Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Amanat Nasional (PAN)	4	-	4
Partai Gerindra	3	-	3
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3	-	3
PDI Perjuangan (PDIP)	3	-	3
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	-	3
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	-	2
Partai Demokrat	1	1	2
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	-	1	1
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	-	1
Partai Bulan Bintang (PBB)	-	1	1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	-	1
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-	1
Jumlah	22	3	25

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 13. Jumlah Penduduk yang Terdaftar, Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Lombok Barat	456.584	307.809	8.999	139.776
Lombok Tengah	771.908	460.468	8.487	294.673
Lombok Timur	876.026	615.899	36.720	223.407
Sumbawa	326.367	245.419	2.588	78.360
D o m p u	162.323	135.432	858	8.033
B i m a	380.035	262.950	1.553	115.532
Sumbawa Barat	92.684	71.999	653	20.037
Lombok Utara	159.272	127.739	1.813	29.720
Kota Mataram	297.982	159.348	5.292	143.926
Kota Bima	105.446	83.952	1.619	19.873
Nusa Tenggara Barat	3.499.265	2.341.492	109.594	1.048.179

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 14. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Terakhir di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	23 September 2013	4
Lombok Tengah	9 Desember 2015	5
Lombok Timur	13 Mei 2013	4
Sumbawa	9 Desember 2015	3
D o m p u	9 Desember 2015	4
B i m a	15 Desember 2015	4
Sumbawa Barat	9 Desember 2015	3
Lombok Utara	9 Desember 2015	2
Kota Mataram	9 Desember 2015	2
Kota Bima	13 Mei 2013	7
Nusa Tenggara Barat	13 Mei 2013	4

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 15. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Sah	% Suara Sah Terhadap Jumlah Pemilih
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	456.584	307.809	67,42
Lombok Tengah	771.908	460.468	59,65
Lombok Timur	876.026	615.899	70,31
Sumbawa	326.367	245.419	75,20
D o m p u	162.323	135.432	83,43
B i m a	380.035	262.950	69,19
Sumbawa Barat	92.684	71.999	77,68
Lombok Utara	159.272	127.739	80,20
Kota Mataram	297.982	159.348	53,48
Kota Bima	105.446	83.952	79,62
Nusa Tenggara Barat	3.499.265	2.341.492	66,91

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 16. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
	Jumlah	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	188.994	61,40	Golkar, PAN, Demokrat, Hanura, PDIP dan PDK
Lombok Tengah	460.468	46,34	PKS dan Gerindra
Lombok Timur	272.726	42,28	Independen
Sumbawa	117.458	47,86	Demokrat-PDIP
D o m p u	49.979	36,74	Gerindra, Nasdem, Hanura
B i m a	105.506	40,12	Golkar, Hanura, Gerindra
Sumbawa Barat	30.732	42,68	PDIP, PBB, PKS, PKPI, Partai Nasdem, PKB
Lombok Utara	68.335	52,75	Gerindra, PDIP, PKB, PKS, PPP
Kota Mataram	159.348	77,27	PKS, PKB, Partai Hanura, PAN, PKPI, Partai Nasdem
Kota Bima	22.732	33,03	Partai Demokrat, PDI-P, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
Nusa Tenggara Barat	1.038.638	44,00	Demokrat

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 17. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	Laki-laki	S-3	59	Bupati Lobar
Lombok Tengah	Laki-laki	S-1	49	Bupati
Lombok Timur	Laki-laki	S-1	68	Wiraswasta
Sumbawa	Laki-laki	D-III	61	Anggota DPRD Prov NTB
D o m p u	Laki-laki	S-1	51	Bupati
B i m a	Perempuan	Paket C	36	Wakil Ketua DPRD
Sumbawa Barat	Laki-laki	S-3	52	Sekretaris Daerah KSB
Lombok Utara	Laki-laki	S-3	44	Wakil Bupati
Kota Mataram	Laki-laki	SMA	55	Walikota
Kota Bima	Laki-laki	SMA	46	Walikota
Nusa Tenggara Barat	Laki-laki	S-3	40	Gubernur NTB

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan

Tabel 18. Jumlah Peraturan Daerah dan Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD di NTB Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	12	5
Lombok Tengah	7	2
Lombok Timur	12	1
Sumbawa	16	6
D o m p u	10	8
B i m a	5	1
Sumbawa Barat	21	6
Lombok Utara	10	0
Kota Mataram	24	7
Kota Bima	14	1
Nusa Tenggara Barat	13	4

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 19. Jumlah Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang Mendaftar dan Total Terdaftar di NTB Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Ormas/LSM yang Mendaftar Tahun Ini	Total Ormas/LSM Terdaftar
(1)	(2)	(3)
Lombok Barat	7	75
Lombok Tengah	26	208
Lombok Timur	27	167
Sumbawa	9	140
D o m p u	360	652
B i m a	56	298
Sumbawa Barat	24	91
Lombok Utara	21	82
Kota Mataram	18	68
Kota Bima	40	115
Nusa Tenggara Barat	17	294

Sumber: Survei Statistik Politik dan Keamanan 2017

Tabel 20. Perkembangan Indeks Variabel IDI Nusa Tenggara Barat, 2016-2017

Nama Variabel	2016	2017	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	100,00	0,00
Kebebasan Berpendapat	72,23	100,00	27,77
Kebebasan Berkeyakinan	44,59	64,73	20,14
Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	100,00	0,00
Hak Memilih dan Dipilih	74,17	74,17	0,00
Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	0,00
Pemilu yang Bebas dan Adil	100,00	100,00	0,00
Peran DPRD	52,94	72,19	19,25
Peran Partai Politik	100,00	100,00	0,00
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	26,17	97,59	71,42
Peran Peradilan yang Independen	87,50	100,00	12,50

Sumber: Badan Pusat Statistik

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

<https://ntb.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram

Telp. (0370) 621385 ; Fax: (0370) 623801

E-mail : bps5200@bps.go.id

Website : <http://ntb.bps.go.id>